

Evaluasi Kebijakan Program Di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai

¹Lilis Wahyuni, ²Fara Shaliza

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lancang Kuning Dumai

e-mail: liliswahyuni6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat, belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal, Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang, harga sarana produksi mahal dan harga komoditi pertanian rendah, produksi pertanian belum maksimal, dan regulasi di bidang pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Provinsi Riau, khususnya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Justifikasi pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Dumai dalam hal mewujudkan ketahanan pangan. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumen. Analisis data dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kebijakan, Pangan*

Abstract

This research is motivated by the low level of community food security, not optimal diversification of local food consumption, insufficient agricultural human resources, expensive production facilities and low agricultural commodity prices, not optimal agricultural production, and agricultural regulations. The purpose of this study was to evaluate and determine the inhibiting factors in the implementation of program policies in the Food Crops and Horticulture Sector in the context of poverty alleviation at the Food and Agriculture Service Office of Dumai City. This research was conducted at the Food and Agriculture Security Service of Dumai City, Riau Province, especially in the Field of Food Crops and Horticulture. This research focuses on evaluating the food crop program policies in the context of poverty alleviation at the Food and Agriculture Service Office of Dumai City. The justification for selecting the location is based on the consideration that the Dumai City Food and Agriculture Service is a Regional Apparatus Organization (OPD) which has the delegation of duties and authority of the Mayor of Dumai in realizing food security. To obtain data, this study used triangulation methods, namely: Observation, Interview and Documents. Data analysis using descriptive research type with qualitative analysis.

Keywords: *Evaluation, Policy, Community food*

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemiskinan menurut Bappenas adalah keterbatasan pangan (Eni Febriana, 2010:27). Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai berupaya menyusun kebijakan program pertanian untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Dumai. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yaitu 1) pencapaian swasembawa padi, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

Dalam pelaksanaan kebijakan program pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, masih ditemukan beberapa masalah pokok. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini

Tabel 1
Pemetaan Masalah Kebijakan Program
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

No	Masalah Pokok	Indikator/Parameter
1	Masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat	<input type="checkbox"/> Distribusi pangan belum diatur secara baik. <input type="checkbox"/> Kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi. <input type="checkbox"/> Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perorangan masih kurang. <input type="checkbox"/> Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
2	Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal	<input type="checkbox"/> Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang. <input type="checkbox"/> Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas.
3	Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang	<input type="checkbox"/> Terbatasnya kemampuan petani. <input type="checkbox"/> Masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian.
4	Harga sarana produksi mahal dan harga komoditi pertanian rendah	<input type="checkbox"/> Rata-rata petani tidak mempunyai lahan, hanya sebagai penggarap. <input type="checkbox"/> Harga sarana dan prasarana pertanian yang tinggi. <input type="checkbox"/> Harga produk pertanian yang fluktuatif.
5	Produksi pertanian belum maksimal	<input type="checkbox"/> Tingginya ketergantungan import pangan. <input type="checkbox"/> Rendahnya produktivitas komoditi pertanian. <input type="checkbox"/> Rendahnya produksi komoditas pertanian.
6	Regulasi dibidang pertanian	<input type="checkbox"/> Tekanan alih fungsi lahan pertanian. <input type="checkbox"/> Lapangan usaha pertanian belum mampu menjadi sektor basis.

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2019.

Penelitian yang pernah dilakukan terkait evaluasi diantaranya yaitu: Al Hakim, M. L. (2015) tentang Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya ada beberapa indikator yang belum dipenuhi yaitu: efektivitas, efisiensi, pemerataan dan responsivitas. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irawan, R., & Yuliani, F. (2017) tentang evaluasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya: efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018) tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor indikator yang belum terpenuhi yaitu: efisiensi.

Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan di atas yaitu masih adanya keterbatasan pangan di daerah Kota Dumai yang mengakibatkan belum adanya penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

2. METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Provinsi Riau, khususnya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Justifikasi pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Dumai dalam hal mewujudkan ketahanan pangan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan mengamatan langsung terhadap suatu obyek tertentu dalam periode tertentu. Dengan melakukan observasi akan diperoleh informasi yang dapat memperjelas suatu obyek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana penulis dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan untuk memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Dokumen

Data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, usulan penelitian, media massa dan sumber lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Hipotesis Kerja

Dengan adanya penelitian Evaluasi Kebijakan Program ini dapat memberi kontribusi yang lebih baik dalam perencanaan kebijakan program yang akan disusun oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai khususnya pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Analisis Data

Setelah data terkumpul sebagaimana yang diharapkan, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Nugroho (2014:121) mengemukakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data, yang berkenaan dengan proses seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraktasi, dan transformasi data yang muncul dalam catatan penelitian.
2. Penyajian data, yaitu penataan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan penelitian yang sekaligus merupakan verifikasi penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan judul Evaluasi Kebijakan Program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Peneliti melakukan analisis fenomena yang terjadi tersebut dengan menggunakan teori William N.Dunn dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan telah menetapkan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan:
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
 - c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
 - d. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
 - e. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
 - f. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - g. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan:
 - a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis
 - c. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 - d. Peningkatan Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
 - b. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan:
 - a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
 - c. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

b. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

Penyusunan program tersebut mengacu pada landasan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Tujuan dan sasaran program yang telah disusun dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Tujuan dan Sasaran Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah kelompok tani yang dibina dan diberi bantuan 2. Meningkatkan produksi pertanian 	<p>Menyiapkan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat</p> <p>Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian dengan pemanfaatan lahan tidur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian 2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang menyentuh ke masyarakat 1. Ekstensifikasi/intensifikasi pertanian 2. Menyediakan sarana prasarana, SDM untuk meningkatkan mutu dan produksi pertanian 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM penyuluhan pertanian
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 	Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan masyarakat

	2. Menurunnya kasus hewan menular	Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak serta produk pangan asal hewan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
--	-----------------------------------	---	--

b. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk mencapai suatu tujuan. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Program pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai disusun untuk periode lima tahun, yaitu dari Tahun 2016-2021 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra).

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode lima tahunan. Program yang disusun bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik APBD Provinsi Riau maupaun APBD Kota Dumai.

Penyusunan program dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan usulan petani pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan dengan melampirkan proposal kelompok tani, dimana kelompok tani harus sudah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) sehingga dapat diinput ke dalam e-proposal. Hasil usulan kelompok tani selanjutnya diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kota Dumai dan diselaraskan dengan program yang ada pada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Dumai.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik terjadi apabila tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa semua program yang disusun dan dituangkan menjadi kegiatan telah direalisasikan sesuai sasaran. Namun dalam realisasi kegiatan tersebut terdapat kendala dalam hal waktu. Untuk mengatasi hal ini dilakukan komunikasi yang intensif oleh Penyuluh Pertanian kepada kelompok tani sebagai sasaran kegiatan.

d. Pemerataan

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Adapun 2 unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan
2. Kelompok masyarakat penerima kebijakan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pemerataan distribusi manfaat dari program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah merata. Hal ini dapat dilihat dari kelompok sasaran yang sudah pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya tidak bisa mendapat bantuan pada tahun berikutnya. Langkah ini diambil supaya program yang dilakukan bisa merata kepada kelompok tani di Kota Dumai.

e. Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani sasaran kegiatan, diperoleh informasi bahwa kelompok tani sangat menghargai bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk kegiatan usaha tani yang dilakukan. Kelompok tani berharap bahwa pemerintah senantiasa memperhatikan kebutuhan kelompok tani untuk peningkatan produksi hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

f. Ketepatan

Yang dimaksud dengan ketepatan adalah kesesuaian program yang telah ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara, program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merasa sangat terbantu dan hal ini sesuai dengan tujuan dari program tersebut yaitu meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

4. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai telah dilaksanakan dengan baik. Dari enam indikator evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, lima indikator telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, yaitu pada indikator kecukupan. Hal yang menjadi kendala pada indikator ini adalah waktu realisasi bantuan yang mundur dari rencana yang telah ditetapkan. Penyebabnya antara lain karena proses administrasi yang belum selesai dan terjadinya perubahan perencanaan kegiatan.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan masukan atau saran berupa:

1. Perencanaan dalam hal waktu perlu disusun lebih baik lagi dengan mempertimbangkan proses administrasi dan penganggaran kegiatan.
2. Perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antara Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar perubahan atau revisi terhadap perencanaan dapat segera diketahui untuk melakukan perencanaan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] EniFebriana, (2010:27). IndikatorKemiskinan <http://digilib.unila.ac.id/8733/104/BAB%20I.pdf>
- [2.] Al Hakim, M. L. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).
- [3.] Irawan, R., & Yuliani, F. (2017). evaluasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1-15.
- [4.] Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *JURNAL GOVERNANSI*, 4(1),45-56.

- [5.] Arikunto, Suharsimi dan safruddin, Cepi Abdul Jabar, 2009, *Evaluasi Program Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [6.] Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [7.] Pasolong, Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- [8.] Purwanto & Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- [9.] Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- [10]. <http://digilib.unila.ac.id/8733/104/BAB%20I.p>
- [11]. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-2015
- [12.] Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2016. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2016-2021.